

# **ANALISA KINERJA KEUANGAN 34 PROVINSI INDONESIA DI TAHUN 2018**

**Harsono Yoewono**

Tanri Abeng University

Jl. Swadarma Raya No.58, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta, Indonesia

**Abstract** - Power sharing and delegation is politics in nature. The economic side appears on the regional budget planning and realisation. It is the mechanics and the setting of general policy, priority, and plafond of temporary budget. The latent fiscal gap occurs when revenues collected are lesser than expenditures spent, vice versa. Higher portion of expenditures posted as basic allocation has not been coped well with steady regional income. Supports in terms of better capability and capacity to collect regional revenues appear to be non-existent and meaningless, but the resource-rich regions. Even so, the central government appears to have big and deep impacts on the definition of taxable objects and types, and local retributions. This study is to seek which financial performance indicators that can be well-predicted by a numerous variables and indicators forming the regional budgets (APBD) of 34 provinces in Indonesia in 2018. The data was collected from DJPK website in early May 2019. The research method is quantitative descriptive in nature, and using both the OLS regression and determinant regression analysis. Based on the research of recent studies, a numerous financial performance indicators were derived as dependent variables, along with the variables forming the regional budgets of 34 provinces in Indonesia as independent variables. Sixteen dependent variables were set, whilst the 48 independent variables comprised of 4 groups, that is 4 variables of regional specific (r\_#), 23 variables of revenues (y\_#), 9 variables of expenditures (c\_#), and 12 variables of finance/fiscal (f\_#). Upon the results of OLS linear regression, 3 variables of financial performance appeared to be the most significant and appealing than the rest. They were independence (k\_08), the ratio of DAU in TKDD to the DAU Formula (k\_16), dan decentralisation (k\_10). On the contrary, 3 variables of financial performance appeared to have no determining variables. They were PAD growth (k\_14), fiscal soundness and regional financial management (k\_03), dan effectiveness

(k\_11). These 3 variables were a part of 4 variables having the least adjusted  $R^2$ , with infrastructure (k\_04) as the remaining one. The heteroscedastic nature that appears in the k\_14 estimation equation has suggested that k\_14 fails to be used as the benchmark and reference of financial performance of regional budgeting, at least in its definition and operationalisation in this study and research. Likewise the usage of f\_07 variable, the fiscal gap 1, the difference of DAU Formula with basic allocation (in basic data source).

**Keywords:** decentralisation, autonomy, financial performance, regional budget, good governance, government transfers

## **I. PENDAHULUAN**

Desentralisasi kekuasaan pernah menjadi isu yang mengemuka setidaknya di 2 periode, yakni pada masa PRRI/Permesta (1956-1958) dan krisis moneter (1997/1998). Di tahun 1950-an, kesenjangan pembangunan ekonomi di daerah dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap personel militer aktif dan purna-aktif membuat beberapa petinggi militer aktif mendeklarasikan pembentukan 4 Dewan Militer dan PRRI/Permesta.<sup>1</sup>

Di awal era reformasi, desentralisasi dan delegasi kekuasaan menjadi tema dan fokus legislasi, seperti terkait pemda, parpol, pilkada, susduk DPR, DPRD, dan DPD, perimbangan keuangan, pembagian urusan, dan lainnya. Aspek yang diatur mencakup penyelenggaraan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan, standarisasi, evaluasi, pengembangan kapasitas, dan lainnya.

Berbagai kewenangan, hak, dan kewajiban pemerintah daerah tertuang dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah (APBD) yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien,

---

<sup>1</sup> Penciutan peran Divisi X Banteng (semacam KOREM) menjadi Brigade, Resimen Infanteri 4, dan terakhir dilebur kedalam Kotter-I BB (Komando Tentara Teritorium I Bukit Barisan) menjadi terbentuknya 4 Dewan Militer dan Deklarasi PRRI/Permesta. Dewan Banteng oleh Letkol Ahmad Husein di Padang per 20.12.1956; Dewan Gajah oleh Kolonel Maludin Simbolon di Medan per 22.12.1956; Dewan Garuda oleh Letkol Barlian di Palembang pada pertengahan Januari 1957; Piagam Permesta oleh Letkol Ventje Sumual di Makassar per 02.03.1957; PRRI di Padang per 15.02.1958, dan Dewan Manguni oleh Mayor Daniel Julius Somba (Kepala Staf Kodam/KDM-SUT (Sulutteng)) di Manado per 17.02.1958.

efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Walau diberikan kewenangan masing-masing untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta menyalurkan aspirasi masyarakat menurut prakarsa sendiri, pemda tidak memiliki kewenangan dalam hal politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi (peradilan); moneter dan fiskal nasional; dan agama. Selain itu, setiap pemda berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

Pembangunan daerah pun tidak terbatas pada aspek fisik seperti fasilitas sosial dan fasilitas publik yang layak, tetapi juga pada aspek hidup dan kehidupan manusia dan kemanusiaan. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengembangan sistem jaminan sosial.

Pembiayaan pembangunan daerah dilakukan melalui mekanisme dan penetapan kebijakan umum dan prioritas APBD serta Plafon Anggaran Sementara. Beberapa pertimbangan yang umum mencakup analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa masalah yang umum terjadi pada manajemen keuangan daerah meliputi:

1. Kesenjangan fiskal yang lebar antara penerimaan yang sedikit dengan pengeluaran yang besar.
2. Kebutuhan fiskal yang belum bisa ditopang dengan kemampuan dan kapasitas daerah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran.
3. Masih tingginya alokasi dasar (biaya aparatur sipil negara).
4. Masih besarnya peran dan intervensi pemerintah pusat dalam penentuan objek dan jenis pajak serta retribusi daerah (Triastuti et al, 2005).

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Otonomi Daerah**

Suatu daerah dibentuk atas pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan lainnya. Bentuknya bisa

berupa penggabungan dan/atau pemekaran wilayah. Beberapa syaratnya mencakup hal-hal administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Salah satu tujuan pembentukan daerah adalah terselenggaranya otonomi daerah.

Bentuk otonomi bisa formal, riil, atau material. Daerah tidak memiliki otonomi formal dalam politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi (peradilan); moneter dan fiskal nasional; dan agama. Di luar otonomi formal, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan daerah otonom.

Suatu daerah memiliki otonomi riil ketika kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat didasarkan pada kemampuan asli dan nyata dari daerah tersebut. Bentuk otonomi riil dinyatakan dalam laporan PAD. Kewenangan daerah yang dirinci dan diuraikan secara eksplisit disebut otonomi material.

Tiga aspek utama dalam implementasi otonomi daerah meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (pemerintah pusat yang dilaksanakan pemda untuk kepentingan daerah setempat). Beberapa kepentingan daerah mencakup (Mardiasmo, 2002):

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Pemberdayaan dan terciptanya ruang bagi masyarakat/publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

## **2.2. Kewenangan Daerah**

Setiap pemda diberikan kewenangan masing-masing untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Setiap pemda berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Walau demikian, pemda tidak memiliki kewenangan dalam politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi (peradilan); moneter dan fiskal nasional; dan agama.

Kewenangan pemda menurut UU No.32/2004 adalah sebagai berikut:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;

6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. penanggulangan masalah sosial;
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan;
12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. pelayanan administrasi penanaman modal;
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait pengelolaan dan pemanfaatan SDA, pemda diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, pelestarian, penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. Khusus untuk sumber daya laut, pemda diberikan kewenangan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut; pengaturan administratif; penegakan hukum, berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan negara.

### **2.3. Hak dan Kewajiban Daerah**

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. memilih pimpinan daerah;
3. mengelola aparatur daerah;
4. mengelola kekayaan daerah;
5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI;
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. melestarikan lingkungan hidup;
12. mengelola administrasi kependudukan;
13. melestarikan nilai sosial budaya;
14. membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
15. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berbagai hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah (APBD) yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

#### **2.4. Fungsi dan Struktur APBD**

Menurut Permendagri No.13/2006, beberapa fungsi APBD mencakup hal-hal berikut:

1. Fungsi Otorisasi. Anggaran Daerah (AD) merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan. AD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan. AD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi. AD diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi. AD harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi Stabilisasi. AD harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, pengeluaran (belanja), dan pembiayaan. Belanja daerah menurut fungsi pengelolaan negara bertujuan untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Beberapa aspek yang *discover* APBD mencakup pelayanan umum; ketertiban dan keamanan; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; agama; pendidikan; serta perlindungan sosial.

Tabel – Struktur APBD

Pendapatan Daerah	Pengeluaran (Belanja) Daerah	Pembiayaan Daerah
<i>PAD</i>	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	<i>Penerimaan</i>
Pajak daerah	Belanja Pegawai	SiLPA TA sebelumnya
Retribusi daerah	Belanja Bunga	Pencairan dana cadangan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Belanja Subsidi	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah	Belanja Hibah	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
	Belanja Bantuan sosial	
	Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
<i>DP</i>	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	Penerimaan piutang daerah
DBH pajak/bukan pajak	Belanja tidak terduga	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
DAU		
DAK		
<i>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</i>	<i>Belanja Langsung</i>	<i>Pengeluaran</i>
Hibah	Belanja Pegawai	Pembentukan Dana Cadangan
Dana darurat	Belanja Barang dan Jasa	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
DBH pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	Belanja Modal	Pembayaran Pokok Utang
Dana penyesuaian dan otonomi khusus		Pemberian Pinjaman Daerah
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya		
Lain-lain		

Sumber: [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)

Keterangan: PAD: Pendapatan Asli Daerah. DP: Dana Perimbangan. DBH: Dana Bagi Hasil. DAU: Dana Alokasi Umum. DAK: Dana Alokasi Khusus.

Pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, bea balik nama. Retribusi daerah terdiri dari jasa parkir kendaraan, jasa angkut sampah, pelayanan pemakaman, retribusi pelelangan, retribusi izin trayek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari BUMD, pengelolaan SDA daerah, bank daerah, maupun pengelolaan swasta dengan kelompok masyarakat.

Lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; tuntutan ganti rugi; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

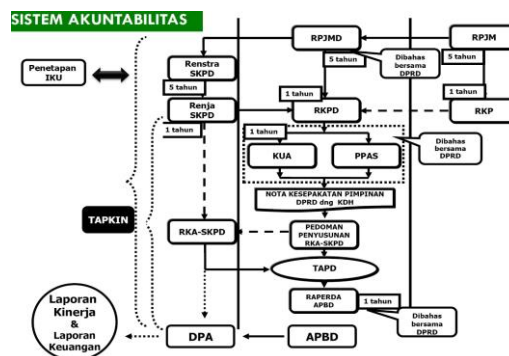
### 2.5. Akuntabilitas dalam Penetapan APBD

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berdasarkan rencana kerja pemda (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rancangan APBD dibuat kepala daerah (KDH) yang dibantu TAPD (Tim Anggaran Pemda).

KUA dan PPAS merupakan acuan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. PPAS berisi program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD. RKA-SKPD kemudian diusulkan sebagai Rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai Perda APBD tahun berikutnya.

Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri memuat hal-hal berikut:

1. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemda;
2. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
3. teknis penyusunan APBD; dan
4. hal-hal khusus lainnya.





Bagan – Akuntabilitas dalam Penetapan APBD  
Sumber: Ramliyanto, Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), 20131210.

RKA-SKPD disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Indikator kinerja dibutuhkan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan atau ditargetkan. Termasuk didalamnya pengetahuan tentang faktor pendukung dan penghambat serta solusi yang mungkin terhadap permasalahan. Ukuran prestasi kerja yang akan dicapai bisa berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

## 2.6. Kinerja Keuangan Pemda

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah terciptanya kemandirian fiskal sekaligus menurunnya ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahan. Termasuk didalamnya adanya indikator upaya desentralisasi yang nyata dan dilakukan pemerintah pusat.

Beberapa indikator kinerja keuangan daerah:

1. Kemandirian. Indikator otonomi fiskal merupakan rasio antara PAD dan Dana Perimbangan (DP). Tolok ukur (*benchmark*) yang biasa dijadikan acuan penilaian kemandirian dibagi kedalam 6 peringkat atau *scoring*, yakni sangat baik (0-10.00), baik (10.01-20), cukup (20.01-30), sedang (30.01-40), kurang (40.01-50), dan sangat kurang (>50).<sup>2</sup>
2. Ketergantungan. Indikator ketergantungan merupakan rasio antara PAD dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) tanpa subsidi (DP). Tolok ukur yang biasa dijadikan acuan dan penilaian ketergantungan dibagi kedalam 6 peringkat, yakni sangat rendah (0-10.00), rendah (10.01-20), sedang (20.01-30), cukup (30.01-40), tinggi (40.01-50), dan sangat tinggi (>50).<sup>3</sup> Indikator ketergantungan alternatif dihitung dengan membandingkan DP dengan TPD.<sup>4</sup>
3. Desentralisasi. Indikator desentralisasi merupakan rasio antara PAD dengan TPD. Tolok ukur yang biasa dijadikan acuan dan penilaian desentralisasi dibagi kedalam

---

<sup>2</sup>Balitbang Depdagri – Fisipol UGM, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II dalam rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta, 1991.

<sup>3</sup>Balitbang Depdagri – Fisipol UGM (1991).

<sup>4</sup> Aswin Rizkiano, Pengukuran Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2004-2008 di Kota Salatiga, 20110419.

- 6 peringkat, yakni sangat kurang (0-10.00), kurang (10.01-20), sedang (20.01-30), cukup (30.01-40), baik (40.01-50), dan sangat baik (>50).<sup>5</sup>
4. Efektivitas. Indikator efektivitas merupakan rasio antara realisasi dan target PAD. Tolok ukur yang biasa dijadikan acuan dan penilaian efektivitas dibagi kedalam 5 peringkat, yakni sangat efektif (>100), efektif (90-100), cukup efektif (80-90), kurang efektif (60-80), dan tidak efektif (<60).<sup>6</sup>
  5. Efisiensi. Indikator efisiensi merupakan rasio antara pengeluaran dan penerimaan. Tolok ukur yang biasa dijadikan acuan dan penilaian efisiensi dibagi kedalam 5 peringkat, yakni tidak efisien (>100), kurang efisien (90-100), cukup efisien (80-90), efisien (60-80), dan sangat efisien (<60).<sup>7</sup>
  6. Keserasian. Indikator keserasian (aktivitas) merupakan rasio antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Tolok ukur ini memperlihatkan kecenderungan semakin rendahnya belanja langsung pemda dalam penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat.<sup>8</sup>
  7. Kemampuan Rutin. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) merupakan rasio antara jumlah (PAD+ DAU+DBH) dengan belanja rutin.<sup>9</sup>
  8. Kemampuan. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) daerah merupakan rata-rata jumlah 3 indeks PAD, yakni Indeks Pertumbuhan (XG), Indeks Pangsa (XS), dan Indeks Elastisitas (XE). XS dihitung sebagai rasio antara PAD dan TPD. XE dihitung sebagai rasio antara belanja langsung dan PAD.<sup>10</sup> Tolok ukur yang biasa dijadikan acuan dan penilaian kemampuan keuangan daerah dibagi kedalam 3 peringkat, yakni rendah (0-0.33), sedang (0.34-0.43), dan tinggi (0.44-1).<sup>11</sup>
  9. Kapasitas Fiskal PDRB. Indikator kapasitas fiskal PDRB merupakan rasio antara (PDRB/jumlah penduduk) dan kapasitas fiskal rata-rata daerah (standar). Kapasitas

---

<sup>5</sup>Balitbang Depdagri – Fisipol UGM (1991).

<sup>6</sup>Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996.

<sup>7</sup>Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996.

<sup>8</sup>Abdul Halim. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat. Jakarta. 2004.

<sup>9</sup>Rizkiano (2011).

<sup>10</sup>Balitbang Depdagri (1991); dalam Rizkiano (2011).

<sup>11</sup>BAPPENAS. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. 2003; dalam Bisma dan Susanto (2010).

fiskal rata-rata merupakan rasio antara (jumlah PDRB/penduduk) dengan jumlah Dati II.<sup>12</sup>

10. Kapasitas Fiskal APBD.<sup>13</sup> Indikator kapasitas fiskal APBD merupakan jumlah PAD dan DBH.<sup>14</sup> DAU berfungsi sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAU suatu daerah dibuat atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. DAU nasional ditetapkan minimal sebesar 26% APBN.
11. Kebutuhan Fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Dasar kalkulasi pendanaan layanan dasar umum adalah jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, PDRB per kapita, dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).<sup>15</sup>  
Indikator kebutuhan fiskal bisa disebut pula sebagai indeks pelayanan publik per kapita (IPPP). IPPP merupakan rasio antara PPP (pengeluaran aktual per kapita untuk jasa-jasa publik) dengan kapasitas fiskal standar (KF<sub>S</sub>).<sup>16</sup>
12. Celah Fiskal (*fiscal gap*). Indikator ini merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.<sup>17</sup> Tolok ukur ini memperlihatkan kecenderungan terbalik antara semakin besar nilai celah fiskal dengan kemandirian (otonomi) keuangan daerah.
13. Ketidakseimbangan Vertikal (*vertical imbalance*). Indikator ini merefleksikan kecenderungan terbalik antara semakin besar belanja pemda dengan kemampuan pendanaan otonom (PAD).<sup>18</sup> Indikator ini merupakan rasio antara transfer antar pemerintahan (TAP) dan total pengeluaran daerah (TPeD).<sup>19</sup>

Berbagai indikator kinerja pemda dibuat berdasarkan 5 kriteria, yakni input, proses, *output*, *outcome*, dan dampak.<sup>20</sup> Faktor input mencakup SDM, waktu, uang, dan

---

<sup>12</sup>Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomika Publik*, BPFE Yogyakarta, 2001.

<sup>13</sup>Triastuti et al (2005) gagal mendefinisikan PL dan BP sebagai unsur dalam penghitungan kapasitas fiskal APBD yang membagi jumlah (PAD+BH+DAU+PL-BP) dengan jumlah penduduk miskin. Pun dalam hal definisi dan dasar kalkulasi KKF, serta rekomendasi memasukkan DBH dalam penghitungan (indeks) kemandirian keuangan daerah. Maria Rosarie Harni Triastuti, Muhadjir Darwin, dan Ratminto, *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Yogyakarta (Studi tentang Desentralisasi dan Otonomi Fiskal Daerah)*, *Sosiosains*, 18 (2), April 2005.

<sup>14</sup>Pasal 28 ayat 3, UU No.33/2004 tentang PKPD.

<sup>15</sup>Pasal 28, UU No.33/2004 tentang PKPD.

<sup>16</sup>Satija, Muhadjir Darwin, dan Ratminto, *Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Sleman*, *Sosiosains*, 19 (3) Juli 2006.

<sup>17</sup>Pasal 27 ayat 3, UU No.33/2004 tentang PKPD.

<sup>18</sup>Anwar Shah dan Zia Qureshi, *Intergovernmental Fiscal Relation in Indonesia: Issues and Reform Option*, Discussion Paper, World Bank, 1994:49-53; dalam Satija et al (2006).

<sup>19</sup>Menurut Triastuti et al (2005), TAP didefinisikan sebagai transfer dari tingkatan lain pemerintahan nasional.

<sup>20</sup>Mohamad Mahsun. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta, 2006.

prasarana. Faktor proses mencakup unsur kecepatan, ketepatan, akurasi, efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan prosedural. Faktor *output* bisa berupa fisik dan non-fisik dalam hal kuantitas dan ketepatan.

Faktor *outcome* mencakup hasil atau efek langsung yang diharapkan terjadi dalam jangka menengah dan melibatkan kepentingan banyak pihak. Sementara faktor dampak bisa berupa efek positif atau negatif dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, atau lainnya.

Alam dan SDM yang berbeda membuat setiap daerah memiliki ciri dan keunikannya masing-masing. Termasuk didalamnya hubungan antara pemerintah pusat dan pemda. Hamid memetakan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemda kedalam 4 pola, yakni instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif.<sup>21</sup> Pada hubungan instruktif, peran pusat lebih dominan dan pemda tidak mampu menjalankan otonomi secara mandiri.

Pada hubungan konsultatif, intervensi pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sudah sedikit lebih mampu menjalankan otonomi. Pada hubungan partisipatif, peran pusat semakin berkurang yang ditandai dengan semakin tingginya tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan otonomi. Pada hubungan delegatif, pemda dianggap sudah mampu dan mandiri dalam menjalankan otonomi dan peran pemerintah terbatas pada urusan pendelegasian.

## 2.7. Studi Terdahulu

Studi tentang kinerja keuangan daerah mayoritas bersifat deskriptif terhadap indikator kinerja keuangan daerah yang diobservasi dan diteliti. Hanya sedikit penelitian yang menganalisa korelasi variabel pembentuk APBD terhadap variabel kinerja keuangan daerah. Penggunaan variabel bebas pun sangat terbatas. Korelasi yang diteliti dan dibahas pun hanya parsial. Kecuali disertasi Badrudin, wilayah penelitian pun terbatas untuk 1 Dati II atau Dati I.

Tabel – Rekapitulasi Beberapa Penelitian Terdahulu

Peneliti	Wilayah	Periode	Beberapa Indikator Kinerja Keuangan Daerah																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Triastuti et al (2005)	Kota Jogja	1998-2004			√c)									√	√			√	√	
Satija et al (2006)	Sleman	1998-2003			√d)								√		√	√	√		√	
Bisma dan Susanto (2010)	NTB	2003-2007	√	√	√	√	√			√	√	√	√							
Rizkiano (2011)	Salatiga	2004-2008		√b)	√a)				√		√									
Ruslina Nadeak (2003)	Maluku	1998-2002			√	√	√													

<sup>21</sup> Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. AMP YKPN. Yogyakarta, 2001:168-169; dalam Ruslina Nadeak (Agnes Jeanette Nadeak), Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah: Kasus pada Kabupaten Maluku Tenggara, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2003, hal.20-21.

Yuliana (2013)	Tenggara Sragen	2010-2012	✓		✓	✓		✓		✓
Rudy Badrudin (2012)	Dati II, Jateng	2004-2008	✓e)							✓
Bugis dan Hanoeboen (2017)	Maluku Tengah	2004-2014		✓						
Kamaroellah (2017)	Pamekasan	2013-2016	✓	✓g)	✓					✓
Nugraha (2017)	Kulonprogo	2007-2011	✓				✓			✓
Maskuna et al (2017)	Kota Blitar	2011-2015		✓		✓				✓
Kuncoro (2008)	DKI Jakarta	2004-2007					✓			
Susanto (2008)	NTB	2003-2007	✓	✓	✓	✓	✓			
Silviana dan Melisa (2014)	Kota Bandung	2008-2012	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Mone et al (2013)	Pangkep	2003-2012				✓				✓

Keterangan Kolom:

1. Kemandirian. 2. Ketergantungan. 3. Desentralisasi. 4. Efektivitas. 5. Efisiensi. 6. Kecerahan. 7. IKR (Indeks Kemampuan Rutin). 8. IKK (Indeks Kemampuan Keuangan). 9. XG (Indeks Pertumbuhan). 10. XS (Indeks Pangsa). 11. XE (Indeks Elastisitas). 12. KfP (Kapasitas Fiskal PDRB). 13. KFa (Kapasitas Fiskal APBD). 14. KFs (Kapasitas Fiskal Standar). 15. IPPP (Indeks Pelayanan Publik Per kapita). 16. PPP (pengeluaran aktual per kapita untuk jasa-jasa publik). 17. CF (celah fiskal). 18. KV (ketidakseimbangan vertikal).

Keterangan huruf:

a) Penyebut: DAU (Dana Alokasi Umum). b) Variasi Penyebut: DAU + DAK (Dana Alokasi Khusus) + Bantuan. c) Pembilang: TPD (Total Penerimaan Daerah). Variasi Penyebut: DBH (Dana Bagi Hasil); PBB (Pajak Bumi dan Bangunan); BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan); SB (Sumbangan Daerah). d) Variasi Penyebut: DBH; SB. e) Pembilang: DBH (Dana Bagi Hasil). f) Indeks Kriminalitas Daerah sebagai alternatif IPM. g) Ketergantungan = Pendapatan Transfer / TPD.

## 2.8. Celah Penelitian

Belum ada penelitian kinerja keuangan daerah yang mencakup keseluruhan provinsi di Indonesia, yakni sebanyak 34 provinsi. Demikian pula belum ada penelitian tentang korelasi antara variabel pembentuk APBD dengan berbagai indikator kinerja keuangan daerah.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Analisa dalam penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif.

### 3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel pembentuk APBD di 34 provinsi di tahun 2018. Data dikumpulkan dari situs web Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan di awal Mei 2019.<sup>22</sup> Data pembentuk APBD terbagi atas 3 sumber kelompok, yakni data dasar, TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), dan APBD.

### 3.3. Pembentukan Model

Berbagai indikator kinerja keuangan daerah menjadi variabel terikat. Estimasi berbagai indikator kinerja keuangan daerah merupakan fungsi berbagai variabel pembentuk APBD, yakni unsur wilayah (luas dan penduduk), penerimaan, pengeluaran (belanja), dan pembiayaan. Pernyataan matematis hubungan antara unsur pembentuk APBD dengan kinerja keuangan daerah dapat dirumuskan ke dalam persamaan berikut:

$$\pi = f(R, Y, C, F)$$

dimana

<sup>22</sup><http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

$\pi$  = indikator kinerja keuangan daerah

$\mathbb{R}$  = ukuran spesifik wilayah

$Y$  = ukuran penerimaan dalam pembentukan APBD

$C$  = ukuran pengeluaran (belanja) dalam pembentukan APBD

$F$  = ukuran pembiayaan dalam pembentukan APBD

### **Variabel Penelitian**

#### Kelompok Variabel Kinerja Keuangan Daerah

k_01		IKK
k_02		IPM
k_03		Kesehatan Fiskal &Pengelolaan Keuangan Daerah
k_04		Infrastruktur
k_05		Kesehatan
k_06		Pendidikan
k_07		Kesejahteraan Masyarakat
k_08	PAD/DP <APBD>	Kemandirian
k_09	PAD / (TPD-DP) <APBD>	Ketergantungan
k_10	PAD/TPD <APBD>	Desentralisasi (XS)
k_11	PAD realisasi / target <APBD>	Efektivitas
k_12	TPeD/TPD <APBD>	Efisiensi
k_13	BTL/BL <APBD>	Keserasian
k_14	gPAD <data dasar>	XG of PAD <data dasar>
k_15	BL/PAD <APBD>	XE
k_16		DAU <TKDD> / DAUF

#### Kelompok Variabel Ukuran Spesifik Wilayah

r_01	Jiwa	Penduduk
r_02	km2	Luas Daratan
r_03	km2	Luas Lautan
r_04	km2	Luas Wilayah

#### Kelompok Variabel Penerimaan dalam APBD

y_01		PDRB/capita
y_02	PAD_1	PAD <data dasar>
y_03	PAD_2	PAD <APBD>
y_04		Pendapatan Lainnya <APBD>
y_05		TPD <APBD>
y_06		DP <APBD>
y_07	DBH_2	DBH <APBD>
y_08	DBH_3	DBH <TKDD>
y_09	DBH_1 = DBHp_1+DBHa_1	DBH <data dasar>
y_10	DBHp_3	DBH Pajak <TKDD>
y_11	DBHa_3	DBH SDA <TKDD>
y_12	DBHp_1	DBH Pajak <data dasar>
y_13	DBHa_1	DBH SDA <data dasar>
y_14	DAK_2	DAK <APBD>
y_15	DAK_3	DAK Fisik+Non-Fisik <TKDD>
y_16		DAK Fisik <TKDD>
y_17		DAK Non-Fisik <TKDD>
y_18		DID <TKDD>
y_19		Otsus + Keistimewaan <TKDD>
y_20		Dana Desa <TKDD>
y_21	DAU_1	Alokasi DAU Formula
y_22	DAU_2	DAU <APBD>
y_23	DAU_3	DAU <TKDD>

#### Kelompok Variabel (Pengeluaran) Belanja dalam APBD

c_01		TPeD <APBD>
------	--	-------------

c_02		BTL <APBD>
c_03		BL <APBD>
c_04	AD_1	Alokasi Dasar (Belanja Pegawai)<Data Dasar>
c_05	AD_2 = Belanja Pegawai <BL + BTL>	Alokasi Dasar (Belanja Pegawai)<APBD>
c_06		Alokasi Dasar (Belanja Pegawai)<BL><APBD>
c_07		Alokasi Dasar (Belanja Pegawai)<BTL><APBD>
c_08		Belanja Barang dan Jasa <APBD>
c_09		Belanja Modal <APBD>
Kelompok Variabel Pembiayaan dan Fiskal dalam APBD		
f_01		Pembiayaan <APBD>
f_02		Penerimaan Pembiayaan <APBD>
f_03		Pengeluaran Pembiayaan <APBD>
f_04	KpF_1 = PAD_1+DBH_1	Kapasitas Fiskal APBD <data dasar>
f_05	KpF_2 = PAD_2+DBH_2	Kapasitas Fiskal APBD <APBD>
f_06	KpF_3 = PAD_2+DBH_3	Kapasitas Fiskal APBD <TKDD>
f_07	CF_1 = DAU_1-AD_1	Celah Fiskal <DAU Formula>(AD dd)
f_08	CF_2 = DAU_2-AD_2	Celah Fiskal <DAU APBD>(AD_2)
f_09	CF_3 = DAU_3-AD_2	Celah Fiskal <DAU TKDD>(AD_2)
f_10	KbF_1 = CF_1+KpF_1	Kebutuhan Fiskal (KbF_1)
f_11	KbF_2 = CF_2+KpF_2	Kebutuhan Fiskal (KbF_2)
f_12	KbF_3 = CF_3+KpF_3	Kebutuhan Fiskal (KbF_3)

Catatan: Kurung siku <...> dibuat sebagai penanda sumber data di Tabel Variabel Penelitian.

### 3.4. Metode Analisa

Pengolahan dan kalkulasi data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel dan IBM SPSS. Pelanggaran asumsi klasik diuji untuk menentukan kelayakan dan kepantasan variabel dan/atau indikator dalam mengestimasi model dan/atau untuk menunjukkan ada/tidaknya kesalahan statistik. Beberapa uji pelanggaran asumsi klasik mencakup:

1. Uji Kolmogorov-Smirnov (distribusi normal data dan variabel).
2. Uji statistik parametrik dengan regresi linier ganda dan ANOVA (uji F).
3. Kalkulasi korelasi sebagai bukti regresi linier ganda.
4. Uji multikolinieritas.
5. Uji heterosedastisitas.
6. Uji otokorelasi.
7. Kesesuaian model (GoF, R2)
8. Uji-t.

Sebanyak 48 variabel bebas akan diuji efeknya terhadap berbagai indikator yang diasumsikan sebagai bentuk kinerja keuangan daerah, yakni dalam bentuk 16 variabel terikat yang ditandai dengan k\_#. Variabel bebas yang digunakan sebagai indikator

untuk mengestimasi terbagi atas 4 kelompok, yakni unsur wilayah ( $r_{\#}$ ), penerimaan dalam APBD ( $y_{\#}$ ), pengeluaran (belanja) dalam APBD ( $c_{\#}$ ), dan pembiayaan/fiskal ( $f_{\#}$ ).

Banyaknya variabel bebas yang digunakan biasanya berdampak pada tingginya nilai korelasi, baik itu dalam bentuk R ataupun  $R^2$ . Regresi determinasi dilakukan dalam rangka mencari variabel yang paling berperan dalam mengestimasi variabel yang ingin diprediksi. Indikator persamaan yang paling mendeterminasi biasanya sudah terlihat pada nilai adjusted  $R^2$ .

Nilai adjusted  $R^2$  yang jauh terpuruk dari nilai R dan  $R^2$  secara tidak langsung memberikan sinyal minimnya variabel yang mendeterminasi dalam suatu persamaan yang ingin diestimasi.

#### **IV. HASIL PENELITIAN**

##### **4.1. Nilai N**

Uji normalitas memperlihatkan bahwa lebih dari setengah variabel terikat (yakni 9 dari 16) yang ingin dibuatkan persamaan estimasinya ternyata tidak terdistribusi normal. Sementara pada variabel bebas, hanya 2 dari 48 variabel bebas memiliki nilai (dan statistik) yang tidak terdistribusi normal. Sembilan variabel terikat yang tidak terdistribusi normal adalah  $k_{03}$ ,  $k_{04}$ ,  $k_{05}$ ,  $k_{06}$ ,  $k_{07}$ ,  $k_{09}$ ,  $k_{13}$ ,  $k_{14}$ , dan  $k_{16}$ . Dua variabel bebas yang tidak terdistribusi normal adalah  $r_{04}$  dan  $y_{06}$ .

##### **4.2. Nilai VF**

Dua kesamaan yang umum ada pada regresi linier (OLS) dalam rangka mencari persamaan untuk mengestimasi pengaruh 4 kelompok variabel terhadap 16 variabel kinerja sebagai variabel terikat adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 19 variabel bebas dikecualikan dalam perhitungan yang dilakukan SPSS. Ke-19 variabel yang dikecualikan dalam regresi linier OLS adalah  $r_{02}$ ,  $y_{03}$ ,  $y_{05}$ ,  $y_{06}$ ,  $y_{09}$ ,  $y_{10}$ ,  $y_{15}$ ,  $y_{23}$ ,  $c_{01}$ ,  $c_{03}$ ,  $c_{05}$ ,  $c_{07}$ ,  $f_{02}$ ,  $f_{04}$ ,  $f_{05}$ ,  $f_{06}$ ,  $f_{07}$ ,  $f_{10}$ , dan  $f_{11}$ .
2. Ke-16 persamaan estimasi variabel kinerja keuangan daerah semuanya bersifat multikolinieritas. Hal ini ditandai dengan semua VF bernilai lebih dari 10. Nilai toleransi dan VF dalam statistik kolinieritas pun identik di seluruh 16 persamaan hasil regresi.

##### **4.3. Nilai F**



Sebanyak 7 dari 16 persamaan regresi OLS bersifat tidak signifikan dalam memprediksi 16 variabel kinerja yang ingin diestimasi. Ke-7 variabel kinerja tersebut antara lain **k\_03**, **k\_04**, **k\_05**, **k\_06**, **k\_07**, k\_11, dan **k\_14**. Enam dari 7 variabel kinerja (diktik tebal) tersebut tidak terdistribusi normal, kecuali k\_11. Sembilan variabel kinerja yang bisa diprediksi secara signifikan adalah k\_01, k\_02, k\_08, k\_09, k\_10, k\_12, k\_13, k\_15, dan k\_16.

#### **4.4. Uji Heterosedastisitas**

Uji heterosedastisitas pada regresi linier tanpa konstanta (atau melalui titik 0), dilakukan dengan menempatkan nilai absolut dari residu *unstandardised* pasca-regresi variabel kinerja (k#) sebagai variabel terikat dan 48 variabel bebas sebagai *predictor*-nya. Inferensi ada/tidaknya heterosedastisitas melalui uji Gletsjer dilakukan dengan melihat nilai sig-t dari koefisien estimasi di variabel bebas.

Bila pada regresi linier OLS terdapat 19 variabel bebas yang dikecualikan, jumlah yang sama terjadi pula pada regresi nilai absolut dari residu *unstandardised* pasca-regresi variabel kinerja (k#) sebagai variabel terikat. Perbedaannya terletak pada 4 variabel bebas sebagai *predictor* pada persamaan estimasi.

19 variabel bebas yang dikecualikan pada regresi nilai absolut dari residu *unstandardised* adalah sebagai berikut: **r\_04**, y\_03, y\_05, y\_06, **y\_08**, y\_09, y\_15, **y\_21**, **y\_22**, y\_23, c\_01, c\_03, c\_05, f\_02, f\_04, f\_05, f\_06, f\_10, f\_11. Sebanyak 14 dari 16 persamaan estimasi ternyata memiliki nilai sig-t yang lebih besar dari 0,05. Dengan kata lain, ke-14 persamaan tersebut terbukti tidak melanggar asumsi klasik, yakni pada aspek adanya heterosedastisitas.

Di sisi lain, pelanggaran asumsi klasik terjadi pada 2 persamaan estimasi, yakni dengan abs\_rk14 dan abs\_rk15 sebagai variabel terikatnya. Pada persamaan estimasi dengan abs\_rk14 sebagai variabel terikatnya, 2 variabel bebas (y\_01 dan f\_07) memiliki sig-t kurang dari 0,05 (masing-masingnya 0,010 dan 0,009). Pada persamaan estimasi dengan abs\_rk15 sebagai variabel terikatnya, hanya 1 variabel bebas (f\_07) memiliki sig-t kurang dari 0,05, yakni sebesar 0,026.

Dengan kata lain, PDRB per kapita (y\_01) dan Celah Fiskal I (selisih DAU formula dengan alokasi dasar/belanja pegawai di data dasar) (f\_07) membuka adanya heterosedastisitas (pelanggaran aumsi klasik) pada persamaan estimasi abs\_rk14 (nilai absolut residu *unstandardised* pada regresi linier dalama estimasi pertumbuhan PAD).

Pun pada persamaan estimasi  $k_{14}$  sebagai variabel terikat, *adjusted R<sup>2</sup>* bernilai negatif dan F-stat yang bernilai 0,333. Bila dicermati lebih lanjut, kedua indikator ini (*adjusted R<sup>2</sup>* dan F-stat) ternyata memiliki nilai yang paling rendah dibandingkan dengan persamaan estimasi 15 variabel kinerja lainnya. Secara singkat bisa disimpulkan, bahwa  $k_{14}$  tidak bisa dijadikan patokan dalam mengukur kinerja keuangan daerah.

Dalam hal kontribusi  $f_{07}$  yang membuka adanya heterosedastisitas (pelanggaran asumsi klasik) pada persamaan estimasi  $abs\_rk15$  (indikator elastisitas APBD, rasio belanja langsung terhadap PAD), hal ini menegaskan keberadaan  $f_{07}$  atau Celah Fiskal I (selisih DAU formula dengan alokasi dasar/ belanja pegawai di data dasar) tidak bisa dijadikan patokan dalam mengukur kinerja keuangan daerah.

Kesimpulannya, persamaan estimasi  $k_{14}$  dan variabel  $f_{07}$  tidak bisa dimasukkan ke dalam analisa akhir dalam tulisan ini.

#### **4.5. Nilai DW**

Regresi linier yang dilakukan terhadap data *cross-section* membuat uji otokorelasi kehilangan makna dan relevansi pada penelitian ini. Satu periode analisa jelas tidak menghasilkan residu per periode. Nilai DW yang tersedia di tabel pun dibatasi pada  $n=200$  dan  $k=21$ . Lihat Tabel – *Models with no intercept* yang dikoreksi Farebrother untuk korelasi serial (positif dan negatif).<sup>23</sup>

Menurut Gujarati, asumsi homosedastisitas (kesamaan varian *error*) biasanya tidak bisa diharapkan pada data *cross-section*. Dengan kata lain, data *cross-section* sering mengidap heterosedastisitas. Data *cross-section* jelas sukar dan tidak memiliki korelasi antara variabel bebas dan kemampuan dalam memprediksi variabel yang ingin diestimasi.<sup>24</sup>

Pun bila ada otokorelasi dalam data *cross-section*, korelasi yang ada bisa disebut otokorelasi ruang (spasial), bukan korelasi menurut waktu. Data yang ingin diuji pun perlu diurut secara logis, memiliki arti dan kepentingan ekonomi.

Nilai statistik DW pada studi ini berkisar antara 2,288 sampai 2,873, dengan nilai rata-rata sebesar 2,571.

#### **4.6. Nilai R dan R<sup>2</sup>**

---

<sup>23</sup>William N. Evans, Topics in Time Series Analysis, Econometric Lecture Notes, University of Notre Dame, [https://www3.nd.edu/~wevans1/econ30331/Durbin\\_Watson\\_tables.pdf](https://www3.nd.edu/~wevans1/econ30331/Durbin_Watson_tables.pdf)

<sup>24</sup>Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, 4/e, McGraw-Hill, NY, 2003, hal.441.

Berdasarkan rekapitulasi hasil regresi terhadap 16 variabel kinerja, kemandirian (k\_08) menempati peringkat pertama sebagai persamaan dengan GoF (*goodness of fit*) tertinggi, yakni dengan R sebesar 0,999. Celah Fiskal III (f\_09) dan pengeluaran pembiayaan (f\_03) merupakan 2 determinan utama dalam memprediksi ukuran kemandirian (k\_08) keuangan daerah. Ketika hanya f\_09 berfungsi sebagai prediktor k\_08, nilai R-nya mencapai 0,881; sementara bersama f\_03, kemampuan f\_09 untuk memprediksi k\_08 mampu mencapai R ke level 0,909.

Tabel – Ringkasan regresi linier (OLS) dengan 16 variabel terikat

Var. Terikat	R	R <sup>2</sup>	Adj R <sup>2</sup>	SE est	DW	F	sig F
k_01	0.991	0.982	0.848	9.76289	2.288	7.336	0.032
k_02	0.992	0.983	0.862	1.54350	2.344	8.090	0.027
k_03	0.955	0.911	0.267	7.36793	2.843	1.414	0.407
k_04	0.954	0.911	0.263	7.59444	2.873	1.406	0.409
k_05	0.971	0.944	0.535	7.05516	2.713	2.311	0.216
k_06	0.980	0.961	0.681	6.61052	2.504	3.431	0.119
k_07	0.979	0.959	0.658	8.21752	2.469	3.189	0.133
k_08	<b>0.999</b>	0.998	0.980	6.24950	2.812	55.686	0.001
k_09	0.990	0.980	0.838	7.19848	2.388	6.869	0.037
k_10	<b>0.996</b>	0.993	0.939	3.34270	2.724	18.595	0.006
k_11	0.957	0.916	0.307	23.23300	2.521	1.504	0.378
k_12	0.994	0.988	0.898	3.63343	2.658	11.012	0.015
k_13	0.995	0.989	0.913	7.79746	2.581	12.940	0.011
k_14	0.841	0.707	-1.418	14.23636	2.323	0.333	0.966
k_15	0.996	0.992	0.931	64.05097	2.367	16.305	0.007
k_16	<b>0.997</b>	0.995	0.957	0.46366	2.722	26.117	0.003

Peringkat kedua ditempati persamaan dengan rasio DAU dalam TKDD terhadap DAU Formula (k\_16) sebagai variabel terikat dengan R sebesar 0,997. Peringkat ketiga ditempati persamaan dengan desentralisasi (k\_10) sebagai variabel terikat dengan R sebesar 0,996 dan R<sup>2</sup> sebesar 0,993. Khusus untuk variabel desentralisasi (k\_10), regresi determinasi menghasilkan 6 persamaan estimasi yang terbagi kedalam 2 kelompok, yakni yang melibatkan 3 variabel bebas dan 4 variabel bebas. y\_03 dan y\_06 merupakan 2 variabel determinan yang muncul di 5 dari ke-6 persamaan ini. y\_03 merupakan data PAD <APBD>, sementara y\_6 merupakan data Dana Perimbangan <APBD>.

Pada persamaan estimasi k\_10 dengan 3 variabel bebas, nilai R bersifat inkremental, yakni dari hanya variabel bebas f\_09 (R=0,832), bersama variabel y\_03 (R=0,859), dan bertiga bersama variabel y\_06 (R=0,900).

Pada persamaan estimasi k\_10 dengan 4 variabel bebas, nilai R bersifat inkremental, yakni dari 2 variabel bebas pertama (y\_03 dan y\_06) yang sangat mendeterminasi pada level 0,900. Dua variabel bebas lainnya yang mampu

mendeterminasi adalah y\_02 dan y\_10. Tiga variabel bebas pertama, (y\_03, y\_06, y\_02), mampu menghasilkan nilai R ke level 0,921. Bersama variabel bebas keempat (y\_10), persamaan yang ingin diestimasi mampu menghasilkan R ke level 0,935.

Akan halnya nilai Adj R<sup>2</sup> yang kecil dan dihipotesakan tidak memiliki koefisien determinasi, Tabel – Ringkasan Regresi Determinasi memperlihatkan 3 dari 4 persamaan yang ingin diestimasi terbukti tidak memiliki koefisien yang mendeterminasi, yakni pada persamaan yang mengestimasi nilai pertumbuhan PAD(k\_14), skor Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah (k\_03), dan efektivitas (k\_11).

Khusus untuk infrastruktur (k\_04), pada regresi linier (OLS), variabel luas daratan (r\_02) termasuk 30 variabel yang dikecualikan dalam mengestimasi. Ketika regresi determinasi dilakukan, variabel luas daratan (r\_02) merupakan determinan utama yang mampu memprediksi variabel infrastruktur (k\_04). Variabel kedua yang bisa mendeterminasi dalam estimasi k\_04 adalah aspek pengeluaran pembiayaan (f\_03). Ketika hanya r\_02 berfungsi sebagai prediktor k\_04, nilai R-nya mencapai 0,448; sementara bersama f\_03, r\_02 mampu mencapai R sampai 0,614.

Tabel – Ringkasan regresi determinasi

Variabel	r_02	r_04	y_01	y_02	y_03	y_06	y_07	y_08	y_10	y_16	y_19	y_21	y_23	c_04	c_06	c_07	c_09	f_03	f_09	Count	
Ho (normal)	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X k_01		1	2				4				3									4	
X k_02									2											1	2
✓ k_03																				0	
✓ k_04	1																	2		2	
✓ k_05		1					2													2	
✓ k_06	1																			1	
✓ k_07							1													1	
X k_08																		2	1	2	
✓ k_09										2										1	2
X k_10					2	3														1	3
X k_11				3	1	2			4												4

X	k_10																		0	
X	k_11					1	3					2							3	
✓	k_12									2	1								2	
✓	k_13																		0	
X	k_14																		2	
✓	k_15	1												2					6	
Count		2	3	1	1	2	2	4	1	2	1	3	2	1	1	1	1	1	3	4

Keterangan: Regresi determinasi di 3 variabel terikat, yakni k\_03, k\_11, dan k\_14, tidak menghasilkan variabel yang mendeterminasi.

Bila kita melihat pada ketiadaan variabel bebas yang bisa mendeterminasi variabel kinerja keuangan daerah, kita dapat menyimpulkan bahwa 3 dari 16 variabel terikat, yakni k\_03, k\_11, dan k\_14, tidak bisa dijadikan ukuran kinerja keuangan daerah. Secara verbal dan definitif, ketiga variabel kinerja keuangan daerah tersebut adalah indikator kinerja Kesehatan Fiskal & Pengelolaan Keuangan Daerah (k\_03), efektivitas (k\_11, rasio PAD yang terealisasi dan target), dan pertumbuhan PAD (k\_14).

k\_16 (rasio DAU dalam TKDD terhadap DAU formula) menjadi variabel kinerja keuangan daerah dengan jumlah determinan terbanyak, yakni 6 dari 48 variabel bebas. Pada saat regresi determinasi, sebanyak 19 variabel bebas dikecualikan oleh SPSS. Ke-19 variabel bebas yang dikecualikan adalah r\_04, y\_03, y\_05, y\_06, y\_08, y\_09, y\_15, y\_21, y\_22, y\_23, c\_01, c\_03, c\_05, f\_02, f\_04, f\_05, f\_06, f\_10, dan f\_11.

Dari 29 variabel bebas yang diestimasi bisa memprediksi variabel kinerja keuangan daerah, hanya 19 saja yang bisa mendeterminasi, sementara 10 variabel bebas lainnya tidak bisa memiliki kemampuan untuk mendeterminasi. Ke-19 variabel bebas yang bisa mendeterminasi terdiri dari r\_02, r\_04, y\_01, y\_02, y\_03, y\_06, y\_07, y\_08, y\_10, y\_16, y\_19, y\_21, y\_23, c\_04, c\_06, c\_07, c\_09, f\_03, dan f\_09.

Dari ke-19 variabel bebas yang bisa mendeterminasi, hanya 2 variabel bebas, yakni y\_07 dan f\_09, yang mampu mendeterminasi sampai 4 variabel kinerja keuangan daerah. Variabel bebas y\_02 berperan mendeterminasi di 4 variabel kinerja keuangan daerah, yakni k\_12, k\_07, k\_05, dan k\_01. Variabel bebas f\_09 berperan mendeterminasi di 4 variabel kinerja keuangan daerah, yakni k\_02, k\_08, k\_09, dan k\_10.

#### **4.7. Penutup**

Berbagai indikator kinerja keuangan daerah dari beberapa studi terkait dikompilasi ke dalam tulisan ini. Beberapa rumusan dan variabel yang dipakai dan diterapkan pada studi terdahulu ternyata tidak bisa diterapkan dalam studi ini. Ketidakjelasan definisi operasional dan sumber data merupakan 2 penyebab utama tidak bisa dipakainya beberapa rumusan dan variabel penting seperti penghitungan kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, celah fiskal, dan lainnya.

Ketidakjelasan nampak terlihat pada beberapa hal berikut, antara lain:

1. Berbedanya nilai DAU pada 3 sumber data di DJPK, yakni data dasar, TKDD, dan APBD.
2. Definisi TBR (total belanja rata-rata) yang tidak jelas dan tidak konsisten.
  - a. Pada penghitungan DAU Formula di tahun 2018, TBR dihitung berdasar data belanja daerah dari laporan realisasi APBD TA 2016 yang disampaikan daerah kepada Kementerian Keuangan atau proyeksi realisasi APBD TA 2016.
  - b. Pada penghitungan DAU Formula di tahun 2017, TBR dihitung berdasarkan data belanja daerah yang bersumber dari pemda provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beban pengalihan urusan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kabupaten/kota ke provinsi.
3. Dasar dan logika perubahan pembobotan berbagai indeks dalam penghitungan variabel kebutuhan fiskal di tahun 2018 dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Beberapa indeks yang dimaksud meliputi indeks penduduk, wilayah, kelautan, pembangunan manusia, kemahalan konstruksi, dan PDRB per kapita.
4. Dasar dan logika perubahan pembobotan penghitungan alokasi dasar dan celah fiskal tahun 2018 dibandingkan 2 tahun sebelumnya.
5. Tidak adanya informasi terkait kebijakan dana transfer umum untuk TA 2018 seperti yang tertulis untuk (atau dalam Undang-Undang) APBN TA 2017.

Sesuai Permenkeu No.48/PMK.07/2016, dalam UU APBN TA 2017, dana transfer umum (DTU) diarahkan lebih dari atau sama dengan 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka:

1. meningkatkan kesempatan kerja,
2. mengurangi kemiskinan, dan

3. mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

## V. SIMPULAN

Dari 13 indikator kinerja keuangan daerah yang bisa dan berhasil dikompilasi ke dalam tulisan ini, dan mengacu pada sumber data dari situs DJPK, sebanyak 16 variabel kinerja keuangan pemerintah daerah berhasil didefinisikan. Empat kelompok variabel pembentuk APBD ditetapkan memiliki peran dalam mengestimasi dan memprediksi variabel kinerja keuangan daerah.

Keempat kelompok variabel tersebut mencakup unsur wilayah (luas dan penduduk), penerimaan, pengeluaran (belanja), dan pembiayaan/fiskal. Unsur wilayah (*r*, *region*) terbagi atas 4 variabel, unsur penerimaan terbagi atas 23 variabel, unsur (pengeluaran) belanja terbagi atas 9 variabel, dan unsur pembiayaan/fiskal terbagi atas 12 variabel. Secara keseluruhan, 48 variabel bebas digunakan untuk mengestimasi dan memprediksi 16 variabel kinerja keuangan daerah.

Dalam proses regresi linier OLS, sebanyak 19 variabel bebas dikecualikan, antara lain **r\_02**, y\_03, y\_05, y\_06, y\_09, **y\_10**, y\_15, y\_23, c\_01, c\_03, c\_05, **c\_07**, f\_02, f\_04, f\_05, f\_06, **f\_07**, f\_10, dan f\_11. Dalam proses regresi determinasi, dengan nilai residual dari regresi OLS yang diabsolutkan dan dijadikan variabel terikatnya, sebanyak 19 variabel bebas yang dikecualikan meliputi **r\_04**, y\_03, y\_05, y\_06, **y\_08**, y\_09, y\_15, **y\_21**, **y\_22**, y\_23, c\_01, c\_03, c\_05, f\_02, f\_04, f\_05, f\_06, f\_10, dan f\_11.

Dari proses regresi linier OLS, sebanyak 3 variabel kinerja keuangan daerah yang paling signifikan diprediksi adalah kemandirian (k\_08), rasio DAU dalam TKDD terhadap DAU Formula (k\_16), dan desentralisasi (k\_10). Mengacu pada nilai *adusted*  $R^2$  yang minim, yakni kurang dari 0,3, sebanyak 4 variabel kinerja keuangan daerah lainnya ditengarai tidak bisa diprediksi dengan baik, yakni k\_14, k\_04, k\_03, dan k\_11.

Sementara dalam proses regresi determinasi, sebanyak 3 variabel kinerja keuangan pemerintah daerah tidak memiliki koefisien yang bisa mendeterminasi, yakni k\_14, k\_03, dan k\_11. Ketiga variabel kinerja ini merupakan bagian dari 4 variabel kinerja dengan nilai *adjusted*  $R^2$  yang minim.

Berdasarkan uji statistik untuk melihat ada/tidaknya heterosedastisitas sebagai bentuk penyimpangan asumsi klasik, definisi variabel k\_14 dalam tulisan ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan dan acuan ukuran kinerja keuangan pemerintah

daerah. Demikian pula untuk definisi variabel *f\_07* dalam tulisan ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan dan acuan ukuran variabel pembiayaan/fiskal daerah.

### **5.1. Keterbatasan**

Penelitian ini hanya menggunakan data dari situs DJPK, yang hanya memberikan 2 periode waktu pelaporan APBD, yakni 2018 dan 2019. Sementara data historis lainnya disajikan dalam bentuk file Microsoft Excel. Persebaran dan distribusi file yang di-*upload* ke situs DJPK bersifat insidental dengan *cut-off date* yang berbeda per satuan waktu pelaporan.

Data yang ada di situs DJPK bersifat sementara. Beberapa diantaranya masih berstatus dalam tahap verifikasi dan konfirmasi. Data yang ada pun bersumber dari dokumen yang dikirim daerah ke DJPK.

Beberapa keterbatasan lainnya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak menggunakan sumber data lainnya seperti BPS, Bank Indonesia, atau lainnya.
2. Penelitian ini tidak pula memberikan deskripsi kualitatif menurut provinsi dan indikator kinerja serta variabel pembentuk APBD.
3. Penelitian ini tidak pula memberikan deskripsi APBD dalam bentuk rancangan, undang-undang, maupun realisasinya.
4. Penelitian ini tidak pula memberikan deskripsi kekuatan dan kelemahan serta daya saing APBD.
5. Penelitian ini tidak pula memberikan cara, rencana, strategi, manajemen perbaikan struktur APBD, atau lainnya dalam rangka peningkatan kinerja keuangan daerah.

### **5.2. Rekomendasi**

Terlepas dari keberadaan 16 variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang berhasil diidentifikasi dan didefinisikan, ada beberapa variabel kinerja lainnya yang memiliki nilai ya (1) dan tidak (0). Proses regresinya pun bersifat tersendiri, yakni menggunakan metode atau model regresi respon kualitatif. Tiga model yang umum adalah LPM (*linear probability model*), logit (logistik), dan probit (normit).

Beberapa variabel kinerja keuangan daerah yang memiliki nilai diskrit adalah sebagai berikut:

1. Opini BPK atas LKPD.
2. Ketepatan waktu penetapan Perda APBD.



3. Penggunaan *e-procurement*.
4. Penggunaan *e-budgeting*.
5. Ketersediaan PTSP.
6. Pemenuhan Kriteria Utama.
7. Inovasi Pelayanan Publik.
8. Kemudahan Investasi.
9. Kemudahan Berusaha.
10. Pengelolaan Sampah.
11. Penyelenggaraan Pemerintahan.
12. Perencanaan Daerah.
13. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Ke-13 variabel kinerja yang memiliki nilai diskrit ini bisa memberi tambahan 27 variabel *dependent* yang bisa diestimasi dan diprediksi, yakni dengan menterjemahkannya ke bentuk variabel *dummy*.

Beberapa data historis terkait APBD menurut satuan waktu dan Dati II sangat memungkinkan untuk ditelusuri lebih lanjut ke penelitian selanjutnya yang lebih kompleks dan komprehensif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. AMP YKPN.Yogyakarta, 2001.
- Abdul Halim. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat. Jakarta. 2004.
- Adrika Fardisa Maskuna, Abd. Kodir Djaelani, dan M. Khoirul ABS. Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015, Universitas Islam Malang, 20170809.
- Anwar Shah dan Zia Qureshi, Intergovernmental Fiscal Relation in Indonesia: Issues and Reform Option, Discussion Paper, World Bank, 1994:49-53.

- Aswin Rizkiano, Pengukuran Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2004-2008 di Kota Salatiga, 20110419.
- Balitbang Depdagri – Fisipol UGM, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta, 1991.
- BAPPENAS. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. 2003.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Manual Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta. 1991.
- Haryo Kuncoro, Variansi Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, Vol.1, No.2, Agustus 2008.
- Hery Susanto, Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2003-2007, FE Universitas Terbuka, 2008.
- I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto, Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007, GaneÇ Swara, Edisi Khusus, Vol.4, No.3, Des. 2010.
- Indah Yuliani Mone, Rahardjo Adisasmita, Mediaty, Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Pangkep, 2003-2012, 20131127.
- M. Bugis dan Bin Raudha A. Hanoeboen, Analisis Tata Kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah, 20170526.
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Andi.Yogyakarta. 2002.
- Mardiasmo.Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah.Andi.Yogyakarta. 2002.
- Maria Rosarie Harni Triastuti, Muhadjir Darwin, dan Ratminto, Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Yogyakarta (Studi tentang Desentralisasi dan Otonomi Fiskal Daerah), Sosiosains, 18 (2), April 2005.
- Mohamad Mahsun. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE, Yogyakarta, 2006.

- Pandu Cahya Nugraha, Analisa Index Perhitungan Ratio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta Periode Tahun 2007 sampai dengan 2011, *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis*, Vol.5, No.1, 2017, hal.94-108.
- R. Agoes Kamaroellah, Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan. Laporan Penelitian, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan. 2017.
- Ramliyanto, Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), 20131210.
- Rudy Badrudin, Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
- Ruslina Nadeak (Agnes Jeanette Nadeak), Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah: Kasus pada Kabupaten Maluku Tenggara, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2003.
- Satija, Muhadjir Darwin, dan Ratminto, Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Sleman, *Sosiosains*, 19 (3) Juli 2006.
- Silviana dan Melisa, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2008-2012, *Profita*, Vol.6, No.3, Des. 2014.
- Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomika Publik*, BPFE Yogyakarta. 2001.
- Yuliana, Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Ditinjau Dari Rasio Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Periode 2010-2012), Skripsi, Fak.Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

### **Peraturan**

- UU No.33/2004 tentang PKPD (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)
- UU No.32/2004 tentang Pemda
- UU No.22/1999 tentang Pemda
- UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa (LN~1979 No.56, TLN No.3153)
- UU No.5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN~1974 No.38, TLN No.3037)

UU No.19/1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Dati III di Seluruh Wilayah RI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59/2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13/2006.